

KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM DI NAGARI KURAI TAJI PARIAMAN PADA MASA PEMBERONTAKAN PRRI 1958-1961

Arief Rahman Hakim¹, Melia Afdayani²,

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
ar2714981@gmail.com, meliaafdayeni@uinbukittinggi.ac.id.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Nagari Kurai Taji pada masa pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958-1961. Sebagai salah satu nagari di Pariaman, Kurai Taji memiliki keragaman dalam praktik keagamaan yang mencerminkan dinamika Islam lokal antara tradisi tarekat dan gerakan modernis. Konflik PRRI tidak hanya berdampak pada aspek politik dan militer, tetapi juga turut memengaruhi kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Kurai Taji sebelum dan selama pemberontakan PRRI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan, 1) Heuristik, pengumpulan sumber primer seperti arsip dokumen yaitu manuskrip yang ditulis oleh Kasim Munafy anggota Masyumi Padang Pariaman, serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan sumber sekunder berupa wawancara dengan orang yang mengetahui peristiwa di Kurai Taji ini secara lisan maupun tulisan, kemudian buku-buku dan karya ilmiah terkait 2) Kritik sumber, yakni penilaian terhadap keaslian dan kredibilitas sumber; 3) Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh; dan 4) Historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum PRRI, kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kurai Taji berjalan harmonis meskipun terdapat perbedaan paham antara tarekat Syattariyah dan Muhammadiyah. Namun saat PRRI berlangsung, kehidupan masyarakat mengalami gangguan signifikan. Aktivitas keagamaan di masjid dan surau menurun drastis akibat tekanan militer dan situasi keamanan yang tidak kondusif. Beberapa tokoh Muhammadiyah ditangkap karena dianggap terlibat dalam pemberontakan, sedangkan masyarakat Syattariyah memilih membatasi kegiatan.

مستخلص

البحث

Abstract

Keywords: *PRRI, Kurai Taji, Tarekat Syattariyah, Muhammadiyah, Masyarakat Islam*

كلمات
أساسية
Keyword

INTRODUCTION (مقدمة)

Sumatera Barat pada tahun 1950-an termasuk dalam keresidenan Sumatera Tengah yang terdiri dari daerah Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Setelah keluar Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, maka Sumatera Barat, Riau dan Jambi tersebut berubah menjadi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Kemudian dari peraturan tersebut terbentuklah wilayah administratif yang membagi Sumatera Barat menjadi beberapa kabupaten dan kota.

Pada tahun 1950 setelah masa revolusi Indonesia, berbagai masalah mulai timbul ditandai dengan adanya berbagai percobaan perlawanan terhadap pemerintahan pusat, tetapi selalu dapat diatasi dengan kekuatan militer secara koersif (keras). Salah satunya yang terjadi pada tahun 1958 sampai 1961 terjadi perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat yang digerakan oleh dewan-dewan daerah di Sumatera. Gerakan itu adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), berpusat di Sumatera Barat yang dikomandoi oleh Kolonel Ahmad Husein. Munculnya PRRI dilatarbelakangi karena adanya kekecewaan terhadap Presiden Soekarno yang kepemimpinannya otoriter, dan kekecewaan itu berupa kesenjangan dalam bidang politik, sosial, ekonomi antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Berkembangnya pergolakan PRRI di Sumatera Barat berpusat di Padang dan Bukittinggi. Awal mula pemberontakan PRRI berawal dari Dewan Banteng yang tergabung dalam Divisi Banteng pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Divisi Banteng ini merupakan sebuah divisi TNI yang berperan pada perang revolusi kemerdekaan yang bertugas mempertahankan wilayah Sumatera Tengah dari kolonial Belanda saat Agresi Militer Belanda. Dewan Banteng ini terbentuk setelah reuni eks Divisi Banteng pada tanggal 25 November 1956. Tujuan dari reuni pertama ini adalah untuk bersama mencari dan memecahkan masalah dan berbagai kesulitan hidup yang terjadi pada mantan anggota Divisi Banteng, dan reuni kedua dilaksanakan di Padang, yang tuan rumah nya Resimen Infanteri 4, TT-I (Komando Tentara Teritorium-I) Bukit Barisan Letnan Kolonel Ahmad Husein. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang, menghasilkan keputusan yang disebut Piagam Banteng.

Kolonel Ahmad Husein yang saat itu menjadi ketua reuni, setelah reuni langsung membentuk Dewan Banteng yang beranggotakan 17 orang. Dengan dibentuknya Dewan Banteng untuk melaksanakan keputusan pada Reuni Eks Divisi Banteng maka Dewan banteng melakukan rapat. Dewan Banteng memperjuangkan tuntutan menyangkut kepentingan daerah Sumatera Tengah. Dalam rencana perjuangan Dewan Banteng mempunyai 5 dasar masalah penting 1, Dwitunggal 2, Pimpinan Angkatan Darat 3, Senat 4, Alat alat Pemerintahan Pusat 5, Administrasi Kenegaraan. Masalah otonomi harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah pusat, Dewan Banteng ingin otonomi daerah tingkat provinsi harus diutamakan. Dewan Banteng menetapkan keresidenan yang tergabung dengan Sumatera Tengah menjadi daerah otonomi daerah tingkat I yaitu provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 10 Februari 1958 kolonel Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum pada pemerintah pusat yang ada di Jakarta yang berisi : 1) Meminta Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu 5 X 24 jam serta mengembalikan mandat kepada presiden 2) Menunjuk Hatta dan

Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru 3) Memberikan kesempatan kepada kabinet baru untuk bekerja sampai pemilu berikutnya 4) Presiden Soekarno/Pejabat Presiden membatasi diri menurut konstitusi 5) Jika tuntutan tersebut dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Dewan Perjuangan mengambil tindakan sepihak.

Namun dari pemerintah pusat tidak menanggapi tuntutan tersebut, melainkan memecat Kolonel Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Mauludin Simbolon, dan H. N. Samual dari jabatan mereka. Dikarenakan tuntutan tidak ditanggapi dan bertolakbelakang dengan hal yang diinginkan, maka pada tanggal 14 Februari 1958 Kolonel Ahmad Husein langsung memproklamkan pemerintah tandingan yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan juga meminta dukungan terhadap tokoh tokoh nasional, seperti Sjafrudin Prawiranegara, M. Natsir, Burhanuddin Harahap dan Soemitro Joyohadikusumo, serta memilih Mr. Sjarfuddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri.

Menurut Sjarfuddin Prawiranegara pembentukan PRRI bertujuan untuk mengingatkan Presiden Soekarno untuk kembali ke negara hukum dan tidak mengajak Partai Komunis Indonesia di pemerintahan, serta agar Presiden Soekarno menaati UUDS 1950. Untuk menumpas PRRI ini pemerintah pusat menjalankan operasi 17 agustus dipimpin oleh Jendral Ahmad Yani. Pada tanggal 17 April 1958 tentara pusat menggunakan kapal perang untuk membombardir kota Padang dari laut dan juga menurunkan pasukan di Bandara Tabiang dan Ulak Karang, kota Padang jatuh ketangan pemerintah pusat kemudian Ibukota PRRI di pindahkan ke Bukittinggi. Pada tanggal 6 Mei 1958 kota Bukittinggi juga diserang oleh tentara pusat, dan juga berhasil ditaklukkan dengan tidak banyak perlawanan oleh pasukan PRRI karena kota Bukittinggi sudah dikosongkan terlebih dahulu dan pasukan PRRI melakukan pelarian ke nagari nagari yang ada di sekitar kota dan juga ke daerah lain.

Sama halnya dengan wilayah lain, wilayah Pariaman juga tidak lepas dari pergerakan PRRI, Kurai Taji terletak di pesisir barat saat itu termasuk dalam bagian Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, pada masa itu masyarakat didominasi oleh pendukung partai politik Masyumi yang berpusat di Nagari Kurai Taji, memberikan dukungan terhadap PRRI karena adanya persaingan politik terhadap PKI, sama dengan wilayah lain di Sumatera Barat Kurai Taji merupakan salah satu Nagari di Pariaman yang terdampak dari peristiwa PRRI. Masyarakat Kurai Taji pada umumnya juga terlibat mendukung PRRI, ketika itu Kurai Taji menjadi pusat penyebaran organisasi Muhammadiyah yang tokohnya juga aktif dipartai Masyumi dan tokoh Muhammadiyah juga memberi dukungan terhadap PRRI, massa pendukung PRRI umumnya berasal dari pegawai negeri sipil, militer, tokoh Muhammadiyah dan petani, selain itu masyarakat Kurai Taji ada dari Kaum Tua (urang Siak atau penganut Syattariyah).

Sebulan setelah penyerangan kota Padang dan Bukittinggi kota Pariaman dan sekitarnya juga tidak luput dari tentara pusat, sebagian lelaki yang pendukung PRRI melarikan diri ke arah gunung Tandikat, mereka meninggalkan harta benda, rumah, sawah dan ladang. Selama penumpasan PRRI daerah Sumatera Barat dinyatakan dalam darurat perang. Tokoh PKI yang ada di Pariaman memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperluas pengaruh di Pariaman dengan membonceng para perwira militer yang terpengaruh komunis. Tokoh PKI melakukan berbagai aksi teror terhadap masyarakat, intimidasi dan tindakan brutal terhadap massa pendukung PRRI di Pariaman. Masyarakat pada saat itu menghadapi masa masa berat karena tentara OPR (organisasi Pemuda Rakyat) yang merupakan binaan PKI melakukan tindakan semena mena terhadap masyarakat dan tidak segan untuk membunuh yang di anggap terlibat PRRI.

Masyarakat Kurai Taji umumnya beragama Islam, perkembangan Islam di Pariaman tidak terlepas dari pengaruh Tarekat Syattariyah di Ulakan yang dikembangkan oleh Syech Burhanudin (1646-1691). Tarekat Syattariyah merupakan tarekat Islam yang pertama di Sumatera

Barat, Tarekat Syattariyah menyebarkan ajaran Islam melalui Surau-surau. Surau pertama yang bangun oleh Syech Burhanuddin adalah surau di Ulakan. Di Kurai Taji surau yang menjadi pusat ajaran Tarekat Syattariyah adalah Surau Punago dan Surau Lubuk Ipuh, dan Tuanku Kali menjadi pimpinan ulama Syattariyah di Kurai Taji. Nagari Kurai Taji sebelum peristiwa PRRI merupakan penganut aliran Tarekat Syattariyah yang didominasi oleh kaum tua, selain itu ada juga pengikut Islam modernisasi Muhammadiyah didominasi oleh kaum muda yang hadir pada tahun 1929 di Kurai Taji.

Kaum muda pembaruan ini hadir seiring dengan pembangunan kereta api di Pariaman, Hadirnya kaum muda pembaruan ini awalnya di tentang oleh kalangan tua karena di anggap ajaran sesat, penganut tarekat Syattariyah dan Muhammadiyah ini sebelum PRRI sudah terjadi sedikit pergesekan dikarenakan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan khutbah jum'at dan penentuan awal puasa, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang kemudian melaksanakan sholat jum'at di mesjid masing-masing. Ditengah komunitas Satriyah ini kaum muda Muhammadiyah ini juga didukung oleh saudagar kaya yang ada di Kurai Taji membuat pergerakan Muhammadiyah ini semakin di permudah. Untuk mempererat hubungan antara dua golongan tersebut tokoh Muhammadiyah sering melakukan negosiasi dengan Tuanku Kali selaku pimpinan Kaum Tua, seperti pada saat Muhammadiyah ingin menjadi Khatib Sholat Juma't, tokoh dari Muhammadiyah ini mendatangi Tuanku Kali untuk meminta izin, dalam negosiasi yang dilakukan awalnya berjalan alot setelah negosiasi yang panjang akhirnya diizinkan namun pada pelaksanaannya tidak, akhirnya kembali melakukan negosiasi yang hasilnya Surau Dagang boleh melaksanakan Sholat Juma't.

Ketika PRRI berlangsung berdampak pada semua masyarakat baik dari masyarakat penganut Syattariyah atau pun Muhammadiyah, namun dampak yang lebih besar terasa oleh masyarakat pengikut Muhammadiyah karena merupakan bagian dari pendukung Masyumi dan laki laki menjadi sasaran oleh OPR, jika tertangkap akan langsung dibunuh bahkan keluarga dari orang yang terlibat juga akan dihabisi. Masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan mengaji pada malam hari di mesjid dan surau namun lebih banyak diisi oleh jamaah perempuan dan anak-anak serta beberapa orang laki-laki yang menjadi imam, namun saat mulai larut malam guru mengaji dan ulama serta tokoh Muhammadiyah yang lain melakukan ijok (melarikan diri) menghindari tentara OPR yang sering razia orang-orang secara acak, supaya bisa keluar masuk kampung pengikut Muhammadiyah harus menunggu informasi dari masyarakat yang masih tinggal agar tidak terlihat oleh OPR. Acara keagamaan lainnya seperti shalat juma't dan sholat tarawih bisa tetap dilaksanakan namun kurang ramai hanya diisi oleh laki laki yang tidak mengetahui apa-apa (orang awam) atau orang yang tidak memiliki pengaruh dimasyarakat dan juga kaum lansia yang tidak terlibat.

Selama pegolakan berlangsung Pengikut tarekat Syattariyah memang tidak ikut terlibat dalam mendukung PRRI namun merasakan dampak yang ditimbulkan dari Peristiwa tersebut seperti pada kegiatan persekolahan yang diliburkan selama pemerontakan terjadi dan sering terjadi razia dilakukan oleh tentara OPR. Dalam kegiatan di mesjid masyarakat Syattariyah pada saat itu juga masih bisa melaksanakan kegiatan mengaji malam, tidak mendapat gangguan yang terlalu serius tidak seperti pengikut Muhamamdiyah, namun ketika itu kondisi yang tidak kondusif dan sangat sepi tetap membuat orang pengikut Syattariyah juga takut untuk keluar malam, banyak juga yang memilih untuk mengungsi karena takut adanya razia.

Surau dan mesjid sebelum PRRI terjadi tidak hanya di gunakan masyarakat sebagai tempat ibadah saja tapi juga digunakan untuk tidur oleh kaum laki, namun saat PRRI itu tidak dilakukan lagi. Masyarakat umumnya mengungsi ke kampung kampung kecil sekitar Kurai Taji yaitu di Kampung apar, Lubuk Ipuh dan Talogondan, disana ada surau-surau kecil dan

masyarakat tidur disana kegiatan mengaji tetap di laksanakan namun karena adanya ketakutan akan bahaya masyarakat lebih menggunakan untuk tempat bermalam saja. pada masa pergolakan PRRI kegiatan Muhammadiyah mengalami kendala, kegiatan belajar mengajar di sekolah Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Mu'allimien Muhammadiyah di alihkan ke kampung kecil di Kampung Apar sementara namun karena keadaan yang tidak dipastikan aman terpaksa sekolah di tutup.

Pada saat pergolakan PRRI berlangsung kegiatan seperti pasar Kurai Taji yang biasanya ramai ketika itu hanya diisi oleh masyarakat perempuan yang menjadi pengganti tulang punggung dan sulit mendapat bahan pangan serta sering terjadi perampokan harta masyarakat oleh PKI ketika malam hari. Masyarakat Perempuan yang masih menetap berjalan kaki membantu mengantarkan pasokan makanan, peralatan dan uang ke tempat persembunyian masyarakat laki laki yang ijok ke hutan. Selama PRRI bergejolak kondisi yang tidak kondusif membuat orang-orang tidak ada berani berjalan di malam hari karena takut terhadap OPR, orang-orang lebih memilih untuk berdiam di rumah.

Tahun 1961 sejak Masyumi di bubarkan merupakan tahun tahun terberat yang di hadapi masyarakat Kurai Taji, setelah PRRI tokoh PKI dan organisasi kiri makin leluasa melakukan tindak intimidasi terhadap masyarakat, dalam situasi tersebut PKI menempatkan wakil wakilnya di nagari sekitar Pariaman, termasuk juga Wali Nagari Kurai Taji dari saat itu orang PKI yaitu Marlian S Bagak atau lebih di kenal oleh masyarakat setempat dengan nama Si Bagak. Semenjak Masyumi bubar tahun 1960 sering terjadi penculikan dan pembunuhan tokoh tokoh Muhammadiyah dan Masyumi, menyadari jiwa terancam ketika malam orang berkumpul di satu rumah yang dijaga oleh parewa (orang menguasai ilmu bela diri). Dalam konflik tersebut, Kurai Taji menjadi salah satu wilayah yang terdampak. Meskipun bukan pusat militer PRRI, Kurai Taji mengalami perubahan sosial yang signifikan akibat gejolak politik dan militer yang terjadi di sekitarnya, kehidupan sosial-keagamaan masyarakat di Kurai Taji juga turut terpengaruh.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul *Kehidupan Masyarakat Islam Pariaman Pada Masa Pemberontakan PRRI 1958 - 1961*.

THEORETICAL FRAMEWORK (نظريات)

Penelitian ini berjudul **"Kehidupan Masyarakat Islam Di Nagari Kurai Taji Pariaman Pada Masa Pemberontakan PRRI 1958 - 1961"** Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan kerangka konseptual dari judul penelitian penulis.

Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini masyarakat yang akan di kaji adalah aktifitas kehidupan masyarakat yang beragama Islam pada saat PRRI ini sedang berlangsung

Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *salima* dan *aslama*. *Salima* mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan *aslama* juga mengandung arti kepada Tuhan, ketundukan, dan berserah, yang disebut dengan muslim adalah orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat, Islam

secara harfiah berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri.

Pemberontakan merupakan situasi yang disebabkan oleh kekecewaan dan ketidakpuasan yang dialami oleh manusia dalam suatu pemerintahan. Secara etimologis Pemberontakan berarti penggulingan kekuasaan atau pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan. Pemberontakan sebagai wujud tindakan melawan penguasa dengan kekerasan fisik atau pun dapat berupa perlawanan bersenjata tujuan untuk memengaruhi kebijakan dari pemerintah yang disebabkan oleh ketidakpuasan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Pada pemberontakan PRRI terjadi konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwakili oleh dewan-dewan daerah yang dipicu oleh kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang lebih mementingkan daerah Jawa dan tidak melihat ke daerah luar Jawa.

METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan

- 1) Heuristik, pengumpulan sumber primer seperti arsip dokumen yaitu manuskrip yang ditulis oleh Kasim Munafy anggota Masyumi Padang Pariaman, serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan sumber sekunder berupa wawancara dengan orang yang mengetahui peristiwa di Kurai Taji ini secara lisan maupun tulisan, kemudian buku-buku dan karya ilmiah terkait
- 2) Kritik sumber, yakni penilaian terhadap keaslian dan kredibilitas sumber;
- 3) Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh yang sesuai dengan penelitian
- 4) Historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

A. Konteks Historis PRRI Dan Posisi Kurai Taji

1. Latar Historis dan Pemicu Terjadinya PRRI

Percobaan perlawanan daerah kepada pemerintah pusat salah satunya adalah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) terjadi pada periode tahun 1958-1961 berpusat di Sumatera Barat. Sumatera Barat Pada awal tahun 1950 tergabung dalam bagian wilayah keresidenan Provinsi Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Ruslan Muljohardjo. Pada awal tahun 1956, beberapa tokoh militer dan sipil di Sulawesi dan Sumatera merasa kecewa terhadap alokasi pembangunan. Dewan Banteng di dibentuk sebagai hasil dari reuni anggota mantan Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Perampingan Divisi

Banteng pada Oktober 1949 menjadi satu brigade (Brigade EE Banteng) menjadi salah satu pemicu kekecewaan terhadap pemerintah pusat..

Setelah perjuangan kemerdekaan, banyak bekas pejuang Divisi Banteng menghadapi kesulitan hidup dan pengangguran di Jawa, sehingga sejumlah perwira bekas Divisi Banteng menginisiasi reuni untuk mencari solusi bersama. Dari reuni tersebut lahir Dewan Banteng yang menuntut otonomi daerah yang luas, pembentukan komando pertahanan daerah di Sumatera Tengah, pembentukan korps Divisi Banteng dalam Angkatan Darat, dan pergantian pimpinan Angkatan Darat. Aspirasi mereka kurang diterima oleh pemerintah pusat hingga menyebabkan ketegangan politik dan pengalihan kekuasaan Sumatera Tengah oleh Dewan Banteng.

Konflik berlanjut dengan pembentukan pemerintahan tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 sebagai respons atas penolakan pemerintah pusat terhadap ultimatum Dewan Banteng. Pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno melakukan operasi militer untuk menumpas PRRI sejak Februari 1958 hingga 1961, termasuk operasi 17 Agustus yang berhasil merebut kembali kota-kota strategis di Sumatera Barat seperti Padang dan Bukittinggi. Perang saudara antara pemerintah pusat dan PRRI menandai ketegangan politik dan perpecahan di Indonesia pada masa itu.

2. Dampak PRRI terhadap Masyarakat Sumatera Barat

a. Dampak Sosial

Pemberontakan PRRI memberikan dampak negatif yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat, menyebabkan kondisi hidup yang sulit dan traumatis. Rasa saling percaya antarwarga berubah menjadi waspada karena pengawasan ketat oleh militer pemerintah pusat (APRI/OPR). Banyak warga memilih merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kekerasan dan pembunuhan, termasuk terhadap tokoh penting seperti Kolonel Dahlan Djambek, sering terjadi, tidak hanya sebagai akibat konflik militer, tetapi juga sebagai balas dendam antar kelompok masyarakat. Masyarakat Minang mengalami penghinaan dan stigma sebagai pemberontak, serta mengalami pemaksaan tunduk oleh pemerintah pusat.

Setelah PRRI berakhir, kekecewaan terhadap pemerintah pusat tetap terasa karena ketidakmerataan pembangunan, sementara pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin kuat menambah ketegangan dan kebencian terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa PRRI menyebabkan gangguan sosial dan penurunan rasa percaya diri masyarakat Sumatera Barat akibat kekalahan dan tekanan dari kekuatan politik yang berkuasa, yang kemudian berkontribusi pada ketegangan politik yang memuncak pada peristiwa G30S PKI.

b. Dampak Ekonomi

Pemberontakan PRRI memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian Sumatera Barat. Perputaran uang terganggu karena mata uang PRRI ditarik kembali oleh pemerintah pusat dan diganti dengan Rupiah, menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Harga bahan pokok melonjak dan kelangkaan terjadi akibat pasar yang sepi dan gangguan pasokan. . Sektor pertanian lumpuh karena lahan tidak digarap selama konflik, yang diperparah oleh pemutusan hubungan perdagangan antara daerah dan pusat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan seperti beras, sehingga terpaksa mengaduknya dengan sagu untuk memenuhi kebutuhan.

Pembangunan di Sumatera Barat terhenti, banyak infrastruktur rusak dan kemiskinan meluas. Akibatnya, banyak masyarakat Minangkabau memilih untuk merantau ke kota-kota besar demi mencari penghidupan yang lebih layak. Secara keseluruhan, PRRI menyebabkan krisis ekonomi dan stagnasi pembangunan yang berdampak panjang bagi wilayah tersebut.

c. Dampak Politik

Meletusnya PRRI berdampak besar pada dinamika politik Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Pemerintah pusat membubarkan Partai Masyumi, memberi ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperkuat pengaruhnya dan mendekati Presiden Soekarno, sehingga terjadi ketidakseimbangan politik dengan membungkam suara oposisi Islam dan nasionalis non-komunis. Tokoh-tokoh penting dari Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang terlibat PRRI dicap sebagai pengkhianat, banyak yang ditangkap dan dijadikan tahanan politik oleh rezim Soekarno. Pemerintah memanfaatkan peristiwa PRRI untuk menyingkirkan lawan politik dan memperkuat kekuasaannya yang semakin terpusat. Akibatnya, masyarakat Sumatera Barat kehilangan kepercayaan diri karena banyak tokoh daerahnya dipenjarakan dan dilemahkan secara politik.

3. Gambaran Wilayah Kurai Taji

a. Sejarah Kurai Taji

Alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama, yaitu Darek sebagai wilayah inti yang terdiri dari tiga Luhak (Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota) serta Rantau yang merupakan wilayah pesisir dan sekelilingnya, salah satunya Pariaman. Kurai Taji merupakan sebuah nagari di pesisir barat Sumatera yang dulunya bagian dari Afdeling Batipoeih X, kini menjadi desa di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Nama Kurai Taji berasal dari tradisi masyarakat setempat yang suka sabung ayam dengan taji khusus, sehingga nama itu melekat pada daerah tersebut. Kurai Taji berkembang pesat sejak pembangunan jalur kereta api oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1920, yang menghubungkan Padang dan Pariaman untuk mendistribusikan komoditas lokal seperti minyak kelapa, kopra, dan sabun. Secara historis, Pariaman adalah wilayah rantau pesisir Minangkabau yang namanya berasal dari bahasa Arab, bermakna daratan yang aman dan makmur. .

b. Lokasi dan Luas Wilayah

Kota Pariaman merupakan kota otonom yang terdiri dari empat kecamatan, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Pariaman Tengah. Desa Balai Kurai Taji terletak di Kecamatan Pariaman Selatan, sekitar 5 km atau 15 menit perjalanan dari pusat kota. Desa ini memiliki luas wilayah 110 hektar dan terbagi menjadi tiga dusun dengan total penduduk sekitar 1.297 jiwa dan 347 kepala keluarga. Luas wilayah Kurai Taji meliputi pemukiman, persawahan, perkebunan, pekarangan, dan fasilitas umum lainnya. Secara geografis, Kurai Taji berbatasan dengan desa-desa tetangga dan sebuah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Desa ini juga termasuk dalam sistem adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kurai Taji yang mengatur aspek kehidupan sosial, adat, hukum adat, dan penyelesaian sengketa masyarakat setempat.

c. Kondisi Ekonomi

Kurai Taji memiliki perekonomian yang kuat di sektor perdagangan dan pertanian, khususnya persawahan yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Pasar

tradisional yang selalu ramai menjadi pusat aktivitas ekonomi, di mana hasil pertanian dan produk lokal diperdagangkan, dikelola oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Keberadaan Stasiun Kereta Api yang masih beroperasi menghubungkan Padang dan Pariaman, memudahkan mobilitas penduduk serta distribusi barang dagangan. Letak Kurai Taji yang strategis dekat dengan jalan raya utama juga mendukung perkembangan ekonomi, terutama di sektor kuliner dan produksi beras. Di pasar Kurai Taji terdapat Los Lambuang yang terkenal dengan kulinernya, menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat setempat.

d. Sosial Budaya

Masyarakat Kurai Taji sangat menjunjung tinggi interaksi sosial sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Interaksi ini tercermin dalam kegiatan keagamaan seperti tidur dan belajar di mesjid serta surau, dan juga dalam masa sulit seperti saat PRRI ketika masyarakat saling membantu untuk bertahan hidup. Karakter masyarakat Pariaman, termasuk Kurai Taji yang bagian darinya, sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam yang terkandung dalam filosofi Syara' Mandaki Adat Manurun, yaitu ajaran agama yang berkembang ke wilayah pedalaman dan adat yang berkembang ke pesisir. Hal ini menciptakan budaya unik, termasuk kebiasaan memanggil laki-laki dewasa dengan panggilan "Ajo" dan perempuan dewasa dengan "Cik Uniang", yang sampai kini masih dipertahankan dalam budaya setempat.

B. Sosial Keagamaan Kurai Taji Sebelum PRRI

1. Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Kurai Taji Sebelum PRRI

Sebelum PRRI meletus, Nagari Kurai Taji di Pariaman mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, transportasi, dan kehidupan keagamaan. Keberadaan jalur kereta api yang menghubungkan Padang dan Pariaman membawa modernisasi, memudahkan perdagangan terutama komoditas kopra yang menjadi andalan daerah ini, serta mempermudah mobilitas masyarakat. Lokasi strategis Kurai Taji yang dilalui jalan raya penghubung Pasaman dan Padang membuatnya sering menjadi persinggahan. Pasar Kurai Taji yang ramai sejak dulu didukung oleh peran stasiun kereta api sebagai pusat pengumpulan kopra dari Pariaman dan sekitarnya, yang kemudian diangkut ke Padang oleh kolonial Belanda. Pada era 1950-an, keberadaan transportasi mobil turut menambah kemajuan dan aktivitas ekonomi di Kurai Taji.

Gambar 1.1 Pasar Kurai Taji tahun 1960



Sumber: Koleksi Keluarga Samaun Bakhri Dalam Buku Samaun Bakhri Berjuang untuk Republik Hingga Akhir Hayat

Pariaman, yang terletak di pesisir barat Sumatera dengan nuansa keislaman yang kuat, memiliki budaya unik yang dipengaruhi oleh sejarah penjajahan Aceh, seperti panggilan “Ajo” untuk laki-laki dewasa dan “Cik Uniang” untuk perempuan dewasa. Mata pencaharian utama masyarakat adalah perdagangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang sama juga berlaku di Nagari Kurai Taji. Kurai Taji berada dekat dengan pusat perkembangan tarekat Syattariyah di Ulakan dan mendapat pengaruh besar dari ajaran tarekat tersebut, terlihat dari adanya surau dan masjid yang menjadi pusat keagamaan.

Kurai Taji memiliki dua paham Islam yang hidup berdampingan, yaitu tarekat Syattariyah (kaum tua) dan Muhammadiyah (Islam modernis), yang turut mengembangkan pendidikan formal dan informal di wilayah tersebut. Sistem pemerintahan nagari masih berjalan secara adat dengan peran sentral wali nagari, penghulu adat, serta lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengatur adat dan menyelesaikan konflik secara musyawarah dan gotong royong.

Pasar Kurai Taji yang ramai setiap hari Senin menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan daerah pesisir dan pedalaman. Pada tahun 1950-1958, wilayah ini relatif aman dengan adat yang kuat menjaga ketertiban masyarakat. Namun, ketegangan mulai muncul ketika Dewan Banteng mengambil alih pembangunan Sumatera Tengah menjelang akhir 1958. Dewan Banteng memberikan bantuan dana pembangunan, termasuk untuk perbaikan jalan di Kurai Taji, sebagai bentuk upaya pengembangan daerah yang terasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat.

2. Tarekat Syattariyah dan perkembangannya di Kurai Taji

a. Sejarah Masuknya Tarekat Syattariyah di Kurai Taji

Pariaman dikenal dengan budaya keislamannya yang kuat, yang berkembang pesat berkat penyebaran Islam oleh Syekh Burhanudin melalui Tarekat Syattariyah. Tarekat ini menjadi kunci penyebaran Islam dan interaksi dengan adat di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Ulakan Pariaman yang menjadi pusat tarekat tersebut. Surau-surau dibagi menjadi Surau Gadang (induk) dan surau-surau kecil di sekitarnya, yang berfungsi sebagai tempat pengajaran agama dan ibadah.

Di Kurai Taji, ajaran Syattariyah dibawa oleh Syekh Janguik Hitam, murid langsung Syekh Burhanudin Ulakan, dengan Surau Lubuk Ipuh sebagai pusat pendidikan dan pengajaran yang diwariskan secara turun-temurun melalui gelar Khalifah Tuanku Kali. Masyarakat Syattariyah menjalankan dzikir sebagai praktik inti yang mengandung makna kesatuan wujud dan mengajarkan paham tauhid. Mesjid Punago dan Surau Tuanku Kali Lubuk Ipuh menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti pengajian, dzikir malam, dan sholat dengan tradisi khusus seperti khutbah berbahasa Arab dan doa Qunut. Surau dan masjid juga berfungsi sebagai tempat tidur bagi pria muda yang belum menikah, sekaligus sebagai pusat pembinaan moral dan sosial. Selain pendidikan keagamaan di surau, masyarakat juga mendapatkan pendidikan formal di sekolah rakyat (volkschool) yang terdapat di wilayah Kurai Taji.

b. Kedatangan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kurai Taji

Perkembangan Islam di Kurai Taji tidak terlepas dari pengaruh dari tarekat Syattariyah yang dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Di tengah kuatnya pengaruh Tarekat

Syattariyah di Kurai Taji, muncul gerakan pembaruan Islam yang dibawa oleh kaum muda, terutama Adnan (Tuangku Imam Ketek), murid dari Syekh M. Thaib Umar. Gerakan ini menyebar pembaruan melalui Surau Paninjauan di Kurai Taji dan mendapat dukungan dari saudagar kaya setempat. Pengaruh jalur transportasi kereta api yang selesai pada awal abad ke-20 mempercepat mobilitas dan berdampak pada penyebaran pembaruan Islam.

Pada tahun 1928, organisasi Muhammadiyah didirikan di Kurai Taji dengan kantor di rumah Sidi M. Ilyas. Tujuan Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Namun, pembaruan ini mendapat penolakan dari kaum tua, seperti Tokoh Tuanku Kali di Masjid Punago, yang menganggap ajaran Muhammadiyah sesat. Surau Dagang menjadi pusat aktivitas Muhammadiyah di Kurai Taji, meliputi pendidikan agama dan kebiasaan mengaji serta tidur di surau bagi kaum laki-laki muda. Pada tahun 1952, dibangun Mesjid Sejarah Muhammadiyah yang juga berfungsi sebagai kantor perserikatan Muhammadiyah Kurai Taji, sekaligus tempat perayaan Sholat Ied yang rutin dilaksanakan. Muhammadiyah juga mendirikan sekolah Tsanawiyah Kurai Taji, dengan tanah wakaf dari H. St. Mangan, yang menarik murid dari berbagai nagari di Pariaman. Disediakan pula asrama untuk murid yang datang dari jauh, dan murid-murid ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan Muhammadiyah, seperti acara konferensi dengan menampilkan seni lagu.

Kehidupan sosial-keagamaan di Kurai Taji sebelum PRRI ditandai oleh ketegangan namun tetap harmonis antara Kaum Tua pengikut Tarekat Syattariyah dan Kaum Muda pendukung pembaruan Islam melalui Muhammadiyah. Meskipun memiliki perbedaan signifikan dalam pemahaman dan praktik Islam, terutama dalam pelaksanaan shalat Jumat dan khutbah, kedua kelompok ini mampu menjalani kehidupan berdampingan dan melakukan negosiasi untuk saling menghormati. Perbedaan tersebut menghasilkan praktik ibadah shalat Jumat yang dilakukan bergilir antara kedua kelompok di mesjid Punago dan Surau Dagang.

Hubungan sosial antar kelompok ini tidak sepenuhnya terpisah karena banyak keluarga yang memiliki anggota dari kedua golongan, menunjukkan adanya jaringan sosial yang menyatukan dalam keragaman paham. Modernisasi yang didorong oleh kemudahan transportasi seperti jalur kereta api memicu keterbukaan pemikiran masyarakat sehingga pembaruan Muhammadiyah lambat laun diterima.

Di bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah Tsanawiyah yang terbuka untuk semua anak masyarakat, termasuk yang berasal dari keluarga Syattariyah, sementara surau-surau tradisional tetap menjadi pusat pendidikan tarekat Syattariyah. Dukungan dari saudagar kaya setempat juga membantu Muhammadiyah bertahan dan berkembang di tengah komunitas yang didominasi aliran Syattariyah. Secara keseluruhan, Kurai Taji menggambarkan contoh unik kehidupan pluralisme keagamaan yang terjalin dengan adat, pendidikan, dan interaksi sosial di tengah tradisi dan modernisasi.

c. Keterlibatan politik Muhammadiyah dan Masyumi di Kurai Taji

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Maklumat pada 3 November 1945 yang mendorong pembentukan partai politik, termasuk dari kalangan umat Islam. Pada tanggal 7-8 November 1945 diadakan Mukhtar Umat Islam di Yogyakarta yang memutuskan pendirian Partai Masyumi, didukung oleh organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis. Masyumi masuk ke Sumatera Barat juga melalui jaringan Muhammadiyah, khususnya diperkenalkan oleh tokoh Buya Oedin di Kurai Taji yang mendapat informasi tentang berdirinya Masyumi saat berkunjung ke Yogyakarta pada 1945. Di

Padang Pariaman, tokoh seperti Kasim Munafy menjadi wakil ketua cabang Masyumi, dengan Syailendra sebagai ketua cabang.

Sejak resmi berdiri di Pariaman pada Januari 1946, Buya Oedin dan tokoh Muhammadiyah aktif memperkenalkan Masyumi ke nagari-nagari sekitarnya. Pada Pemilu 1955, Kasim Munafy terpilih sebagai anggota DPRD Padang Pariaman dari Partai Masyumi, memperlihatkan pengaruh Masyumi yang kuat di wilayah ini. Masyumi menjadi bagian penting dalam dinamika politik lokal dan nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Gambar 1.2 Foto bersama tokoh Muhammadiyah Kurai Taji.



Sumber: Dokumentasi koleksi Fuad Kasmy

Foto bersama tokoh Muhammadiyah Kurai Taji. Dari kiri ke kanan adalah Kasim Munafy, Sidi M. Ilyas, Buya Oedin, dan Syailendra. Foto ini diambil sehari setelah terpilihnya Kasim sebagai Ketua Muhammadiyah Padang Pariaman tahun 1952 di Lubuk Alung, Padang Pariaman.

C. Transformasi Kehidupan Masyarakat Islam Kurai Taji Selama Prri (1958–1961)

1. Kondisi Umum Masyarakat Kurai Taji Masa PRRI

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diproklamasikan pada 15 Februari 1958 oleh Kolonel Ahmad Husein di Padang. Tak lama kemudian, Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) melancarkan operasi militer bernama “Operasi 17 Agustus” untuk menumpas PRRI, termasuk serangan udara ke Padang dan Bukittinggi serta pendudukan kedua kota tersebut pada April dan Mei 1958. APRI kemudian melanjutkan operasi ke wilayah Pariaman, termasuk Nagari Kurai Taji.

Selama konflik, banyak laki-laki dewasa yang diduga mendukung PRRI melarikan diri ke hutan guna menghindari penangkapan dan represi aparat, sementara wanita dan anak-anak tertinggal menghadapi kesulitan sosial dan ekonomi. Pada masa PRRI, wilayah Sumatera Barat dalam kondisi darurat perang; tokoh PKI di Pariaman memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya, menggunakan Organisasi Pemuda Rakyat (OPR) yang melakukan intimidasi serta teror terhadap pendukung PRRI maupun lawan politik seperti Masyumi.

Kondisi di Kurai Taji menjadi sangat sulit, dengan pasar yang sepi dan aktivitas ekonomi yang hampir lumpuh. Kaum perempuan mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Kelangkaan pangan sangat dirasakan, sehingga masyarakat harus mengandalkan hasil pertanian primer dan mencampur beras dengan sagu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketakutan selalu

menghantui warga karena razia, interogasi, dan kontak senjata yang sering terjadi, seperti di kawasan Simpang Basoka, yang menjadi simbol pertempuran sengit antara pasukan APRI dan PRRI.

Selama pemberontakan, jabatan wali nagari di Kurai Taji berada di bawah kontrol tokoh PKI, Si Bagak, yang mengerahkan OPR untuk mengawasi dan menindas tokoh-tokoh Masyumi yang dianggap sebagai musuh, termasuk Kasim Munafy, sekretaris Masyumi Cabang Padang Pariaman. Secara keseluruhan, masa PRRI membawa penderitaan sosial, ekonomi, dan ketegangan politik yang berat bagi masyarakat Kurai Taji

2. Masyarakat Tarekat Syattariyah ketika PRRI

Sebelum pecahnya PRRI, kehidupan keagamaan masyarakat Kurai Taji, khususnya pengikut Tarekat Syattariyah, sangat aktif dengan surau dan mesjid sebagai pusat kegiatan ibadah, wirid, pengajian, dan majelis ilmu. Tarekat Syattariyah tidak hanya memperkuat aspek religius tetapi juga tatanan sosial masyarakat Minangkabau. Namun, selama PRRI berlangsung, aktivitas keagamaan ini terganggu hebat. Jamaah mesjid dan surau berkurang drastis karena banyak tokoh agama dan ulama melarikan diri untuk menghindari represi, sementara yang hadir biasanya hanya anak-anak, perempuan, dan orang tua. Pria dewasa menghindari menghadiri kegiatan keagamaan demi menghindari tuduhan simpatisan PRRI dan penangkapan oleh Organisasi Pemuda Rakyat (OPR).

Tokoh-tokoh tarekat yang tidak terlibat langsung dalam konflik politik tetap menjadi korban kekerasan, seperti pembunuhan Tuanku Kali Abd-Rahman yang disaksikan oleh masyarakat setempat, yang kemudian menimbulkan ketakutan luas sehingga banyak yang mengungsi ke daerah pelosok dan mendirikan surau-surau kecil sebagai tempat berlindung dan beribadah. Namun, pengungsian dan kondisi ketidakamanan turut membatasi pelaksanaan kegiatan keagamaan. Surau dan mesjid utama yang berada di jalur utama sering kosong karena takut razia dan kontak senjata antara APRI dan PRRI selalu mengancam.

Meskipun kondisi politik dan militer yang memburuk membuat aktivitas keagamaan terbatas dan penuh ketakutan, masyarakat di Kurai Taji menunjukkan kemampuan adaptasi dalam mempertahankan kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Mereka berusaha menjaga nilai-nilai agama dan melindungi tokoh penting di lingkungan mereka meski dalam situasi penuh bahaya dan keterbatasan. Hal ini mencerminkan ketangguhan masyarakat Kurai Taji dalam menghadapi situasi sulit selama masa PRRI

3. Masyarakat Muhammadiyah pada masa PRRI

Pasca Pemilu 1955, ketegangan politik di Indonesia, khususnya di Sumatera Tengah dan Kurai Taji, semakin memuncak. Dewan Banteng yang didukung oleh Partai Masyumi dan Muhammadiyah mengambil sikap agresif terhadap pemerintah pusat, sehingga Kurai Taji menjadi basis pendukung kedua organisasi ini. Selama PRRI berlangsung, banyak tokoh Muhammadiyah melarikan diri ke hutan (rimbo) dan kegiatan keagamaan di Surau Dagang serta aktivitas ekonomi di pasar Kurai Taji lumpuh. Peran perempuan dan anak-anak sebagai kurir dan pengantar perbekalan sangat penting untuk mendukung pengungsi dan para pejuang PRRI.

Tokoh Muhammadiyah dan Masyumi menjadi sasaran razia oleh Organisasi Pemuda Rakyat (OPR) yang berafiliasi dengan PKI, sehingga mereka harus bersembunyi di kampung-kampung kecil dan berkomunikasi secara rahasia untuk menghindari penangkapan. Kegiatan pendidikan

Muhammadiyah sempat dialihkan ke tempat-tempat aman namun akhirnya sekolah ditutup karena kondisi yang tidak stabil. Pasca PRRI, perlawanan dihentikan lewat Surat Perintah Kolonel Ahmad Husein pada 1961, namun intimidasi OPR tetap terjadi. Pengaruh PKI kian menguat di Kurai Taji dengan wali nagari yang berasal dari PKI, yang menggunakan kekuasaannya untuk memperluas pengaruh dan melakukan teror sehingga banyak warga merantau mencari keamanan dan penghidupan.

Setelah PRRI, masyarakat mulai kembali ke kampung mereka dengan pengawasan ketat dan harus mendapat surat izin. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang pernah ditahan secara sepihak mulai dibebaskan, dan perlahan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan ekonomi di Kurai Taji mulai pulih. Surau, mesjid, dan sekolah mulai beroperasi kembali, meskipun tantangan ekonomi tetap ada. Muhammadiyah membuka kembali sekolah serta mendirikan Taman Pendidikan Ulama Zu'ama sebagai sekolah menengah atas. Meskipun kondisi sosial dan ekonomi mulai membaik, banyak warga, termasuk tokoh masyarakat seperti Labai Darwis, memilih merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

CONCLUSIONS (خلاصة \ خاتمة)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa kehidupan Islam di Nagari Kurai Taji Pariaman sebelum PRRI berlangsung dalam suasana sosial-keagamaan yang relatif harmonis, meskipun terdapat perbedaan keyakinan antara Tarekat Syattariyah dan Muhammadiyah. Karena tokoh agama, adat istiadat, dan komunikasi yang berjalan di antara kedua kelompok memainkan peran penting, perbedaan ini dapat diatasi dengan damai.

Selama masa pemberontakan PRRI, kondisi masyarakat berubah drastis masyarakat Muhammadiyah yang berafiliasi dengan partai Masyumi dan mendukung PRRI menjadi sasaran kekerasan dari pihak militer dan kelompok-kelompok yang berpihak pada pemerintah pusat, terutama Organisasi Pemuda Rakyat (OPR) yang dipengaruhi oleh PKI. Aktivitas keagamaan tetap berjalan, namun dengan berbagai keterbatasan dan dalam suasana yang tidak kondusif. Kampung kecil di dekat Kurai Taji adalah tempat yang dipilih masyarakat untuk berlindung. Banyak pria yang terlibat dalam PRRI memilih untuk melarikan diri ke hutan. Situasi konflik memaksa masyarakat melakukan adaptasi sosial yang drastis, termasuk perubahan struktur peran gender dan pola mobilitas, sebagai bentuk respon terhadap ancaman militer dan politik. Kaum perempuan mengambil alih tanggung jawab rumah tangga dan menjadi penghubung logistik.

Setelah pemberontakan berakhir, masyarakat mulai kembali ke kampung halaman. Namun kondisi sosial dan keagamaan belum pulih sepenuhnya. Pendukung PRRI yang kembali sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan oleh kelompok-kelompok lawan politiknya. Selain itu, krisis ekonomi dan trauma sosial yang terjadi menyebabkan kehidupan masyarakat berjalan sangat sulit. Proses pemulihan berlangsung perlahan, ditandai dengan upaya masyarakat dalam membangun kembali hubungan sosial dan kegiatan keagamaan di tengah tekanan politik yang masih terasa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik nasional seperti PRRI dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat lokal dan memengaruhi hubungan sosial, struktur keagamaan, dan stabilitas komunitas. Studi ini memperkaya wacana sejarah lokal Minangkabau dengan menunjukkan cara-cara nyata bagaimana masyarakat di luar pusat konflik mengalami dampak langsung dari konflik tersebut.

REFERENCES (قائمة المراجع)

- A. Dahana, Indonesia Dalam Arus Sejarah : Pasca Revolusi, (Jakarta : PT Ichiar Baru Van Hoeve, 2011), Hlm. 301-317
- A. Dahana, Indonesia Dalam Arus Sejarah : Pasca Revolusi, (Jakarta : PT Ichiar Baru Van Hoeve, 2011), Hlm. 306
- Anggi Syafitra, Etmi Hardi, Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik Batang Tarandam di Masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988, (Padang ,Kronologi , Vol. 3. No 1 2021)Hlm. 356-358
- Dahana, Indonesia Dalam Arus Sejarah : Pasca Revolusi, (Jakarta : PT Ichiar Baru Van Hoeve, 2011), Hlm. 301-317
- Delvia Indra Rajudin, Menapak Zaman: Kisah Hidup Kasim Munafy, Tokoh Lokal Muhammadiyah Pariaman (1917-19196), Skripsi, (Universitas Andalas, 2015), Hlm, 16-
- Fadel Rhido firzal, Kehidupan Pedagang “Los Lambuang” Pasar Kurai Taji ,Desa Balai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman 1994-2016, Skripsi, (Universitas Andalas, 2017), Hlm. 24
- Fadel Rhido firzal, Kehidupan Pedagang “Los Lambuang” Pasar Kurai Taji ,Desa Balai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman 1994-2016, Skripsi, (Universitas Andalas, 2017), Hlm. 37
- Faishal Hilmy Maulida, Hitam Putih PRRI-PERSEMESTA : Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961(Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,2018)Hlm. 177
- Fakhrurrazi Kasmy, Membumikan Sang Surya, (Salmah Publishing,2021)hlm. 119
- Fikrul Hanif Sufyan, Accessibility and Modernization: Modern Islam Surau In Nagari Kurai Taji Pariaman 1912-1930, (Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 12 2023)Hlm. 72-74
- Fikrul Hanif Sufyan, Accessibility and Modernization: Modern Islam Surau In Nagari Kurai Taji Pariaman 1912-1930, (Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 12 2023)Hlm. 73-74
- Joko Suryanto, Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat 1958 - 1961, Skripsi, (Yogyakarta : 2009), Hlm. 69-75
- Kasim Munafy, Muhammadiyah Yang Aku Kenal: Sejarah Kehidupan Pribadiku, (Manuskrip, Kurai Taji, 1994)hlm. 17-18
- Mulyawan Kharisma, Pandangan Tarekat Syattariyah,Pandangan Tarekat Syatariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah(Fakultas Syariah dan Hukum,Uin Walisongo 2023)hlm 68-69
- Nila Putri, Padang Masa PRRI (1958-1961), Skripsi, (Padang, Universitas Andalas:2019), Hlm. 39
- Nila Putri, Padang Masa PRRI (1958-1961), Skripsi, (Universitas Andalas:2019)Hlmn.1
- Odrian WD Putra, Etmi Hardi, Nagari Matur Pada Masa PRRI (1958-1961), Jurnal(Padang : 2022).hlm. 238
- R. Z. Leirissa, PRRI Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991), Hlm. 35-42

- R. Z. Leirissa, *PRRI Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991), Hlm. 35-42
- Wawancara dengan Fuad Kasmy, Pensiunan Guru, di Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Selatan, 29 November 2024
- Wawancara dengan Labai Darwis, Labai Nagari di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman selatan, 10 mei 2025
- Wawancara dengan Syukri Umar, Pensiunan Guru, di Desa Air Santok, Pariaman Selatan, 23 oktober 2024
- Wawancara Langsung dengan Fuad Kasmy, Pensiunan Guru, Di Desa Kampung Kandang Pariaman Selatan, 15 Januari 2025
- Wawancara Langsung dengan Syukri Umar, Pensiunan Guru, Di desa Air Santok, Pariaman Selatan, 17 Febuari 2025
- Wawancara Langsung dengan Tuangku Kali Abdurrasyid, tokoh agama, Di Desa Limpato, Kabupaten Padang Pariaman, 16 Febuari 2025
- Widia Firman, *Nagari Koto Gadang Koto Anau Pada Masa PRRI (1958-1961)*, Skripsi, (Padang : 2022).hlm 42